

## RINGKASAN

Penelitian ini mengambil judul “**GERAKAN POLITIK LINGKUNGAN: Kontestasi Kepentingan Nelayan dan Pemerintah dalam Kebijakan Pelarangan Alat Tangkap Ikan Pukat Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) Tahun 2015**”. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk; 1) Mendeskripsikan struktur aktor dan *framing* politik gerakan Front Nelayan Bersatu dalam menolak kebijakan pelarangan alat tangkap ikan pukat hela (*trawl*) dan pukat tarik (*seine nets*). 2) Menganalisa serta menjelaskan benturan kepentingan antara pemerintah dengan nelayan dalam gerakan Front Nelayan Bersatu dalam kebijakan pelarangan alat tangkap ikan pukat hela (*trawl*) dan pukat tarik (*seine nets*) tahun 2015.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan paradigma konstruktivisme serta menggunakan perspektif pluralisme. Sementara dalam pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sementara untuk teknik analisis data menggunakan analisa kualitatif deskriptif dengan model analisis interaktif. Keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi data sumber. Landasan teori penelitian menggunakan teori gerakan sosial, konflik struktural, etika lingkungan dan tipologi nelayan.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa struktur aktor gerakan Front Nelayan Bersatu tidak memiliki struktur yang begitu jelas, namun Bambang Wicaksana sebagai ketua gerakan merupakan aktor penting dalam gerakan tersebut. *Framing* politik gerakan yang digunakan Front Nelayan Bersatu dalam menolak kebijakan pelarangan alat tangkap ikan pukat hela (*trawl*) dan pukat tarik (*seine nets*) adalah ketidakadilan, menyengsarakan, dan tidak pro nelayan. Sehingga target yang pantas untuk disalahkan adalah Menteri Kelautan dan Perikanan selaku pembuat kebijakan. Benturan kepentingan antara nelayan dan pemerintah (Kementrian Kelautan dan Perikanan) merupakan benturan kepentingan antara ekologi dan ekonomi. Pemerintah menginginkan adanya *sustainability* sumber daya laut supaya profesi nelayan tetap menguntungkan di kemudian hari. Sementara nelayan merasa dirugikan atas kebijakan pelarangan alat tangkap ikan pukat tarik dan pukat hela, sehingga pendapatan mereka menurun, bahkan nelayan tidak bisa melaut.

**Kata Kunci:** gerakan sosial, konflik, nelayan, pukat tarik, pukat hela

## **SUMMARY**

*This study entitled “Political Environment Movement: Contestation between Fishermen and Government Interests in Trawl Fishing Gear Device Prohibition and Trawl Drag (Seine Nets) Policy in Year 2015. In general, this study aims to; (1) describe the structure of actors and political framing of the United Fisherman Front in rejecting the policies that prohibit rigger trawl fishing gear (trawl) and trawl drag (Seine Nets), (2) analyze and explain the conflict interest between the government and fisherman in the United Fisherman Front movement when responds to the policy of trawl fishing gear device and trawl drag prohibitions in year 2015.*

*The method used is a qualitative method using constructivism paradigm and the perspective of pluralism. While in the selection of informants using purposive sampling and snowball sampling. Collecting data in this study using observation, interview, and documentation. As for the data analysis using descriptive qualitative analysis with interactive analysis model. The validity of this study using triangulation of data source, while the theoretical basis of the research using social movement theory, structural conflicts, environmental ethics and typology of fisherman.*

*The result of this study revealed that the structure of actors in the United Fisherman Front movement does not have a clear structure, however Bambang Wicaksana as a chairman is an important actor of the movement. The political framing that used by the United Fisherman Front in rejecting the policy of trawl fishing gear device and trawl drag is injustice, misery, and not pro-fisherman. Thus, the target that deserves to be blamed is the Minister of Maritime and Fisheries as policy makers. Conflict interest between the Fishermen and the Government (Ministry of Maritime Affairs and Fisheries) is the conflict caused by the difference of ecological and economical standing. The government wants the sustainability of marine resources in order to remain profitable fishing profession for the fisherman later on. While the fisherman felt aggrieved over the policy which made their incomes declined, or even the fishermen could not go fishing casually.*

***Keywords: social movements, conflicts, fishermen, trawl, seine nets***